

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi oleh dunia saat ini. Pertama kali perubahan iklim secara resmi dinyatakan sebagai permasalahan global dengan pengakuan luas adalah pada tahun 1988, ketika PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendirikan Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC). IPCC merilis Laporan Pertama tentang Perubahan Iklim yang secara jelas menyatakan bahwa aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global.¹

Menurut PBB Perubahan iklim merujuk pada perubahan suhu dan struktur cuaca yang berskala jangka panjang. Perubahan iklim mampu menyebabkan cuaca ekstrem dan terjadinya bencana banjir, longsor, serta resiko lain yang merugikan.² Perubahan iklim menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia. Negara-negara di seluruh dunia telah menyadari pentingnya menghadapi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.³

¹ E Aldrian and MK Budiman, *Adaptasi Dan Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia*, 2011.

² Ajeng Rachmatika Dewi A. and Ega Rosalina, *Mengenal Perubahan Iklim*, ed. Henriette Imelda (Jakarta: Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), 2022).

³ Nana Terangna Ginting, "Mitigasi Dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Melalui Penerapan Teknologi Hijau," *Jurnal Permukiman* 3, no. 2 (2008): 129.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami fenomena iklim ekstrem yang dapat menyebabkan terjadinya musim hujan dan kemarau ekstrem. Selama musim kemarau, pembakaran lahan dan hutan yang tidak terkendali menyebabkan kabut asap dan polusi udara yang ekstrem di wilayah Indonesia.⁴ Akibat dari aktivitas pembakaran tersebut mampu melepaskan sejumlah besar emisi gas rumah kaca ke atmosfer, terutama karbon dioksida yang berkontribusi pada pemanasan global kemudian bermuara pada peristiwa kabut asap.⁵ Kabut asap bukan hanya fenomena lokal, tetapi juga memiliki dampak global yang signifikan terhadap perubahan iklim. Mengurangi pembakaran lahan dan hutan merupakan bagian penting dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim Internasional, komitmen tersebut telah dibuktikan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 terkait justifikasi *UNFCCC* (Konvensi Kerangka Kerja PBB terkait Perubahan Iklim) dan Indonesia terlibat sebagai negara non-annex I.⁶ Maka Indonesia secara sah memiliki komitmen dan tanggung jawab besar serta mengambil manfaat dan memberikan dukungan penuh terkait dengan konvensi tersebut. Termasuk dalam hal penanggulangan pembakaran lahan dan kabut asap di Indonesia yang berimplikasi pada perubahan iklim.

⁴ Julismin, "Dampak Dan Perubahan Iklim Di Indonesia," *jurnal geografi* 5, no. 1 (2013): 39–46.

⁵ A.D Nurhayati, Ervina Aryanti, and B.H Saharjo, "Kandungan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Kebakaran Hutan Rawa Gambut Di Pelalawan Riau (Greenhouse Gases Emission From Peat Fire At Pelalawan Riau)," *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 15, no. 2 (2010): 78–82.

⁶ Ir. Dida Migfar Ridha et al., *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris Dan Nationally Determined Contribution*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah terjadi sejak lama dan menjadi masalah yang berulang-ulang. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan pertama terjadi sekitar tahun 1982-1983 akibat dari peristiwa kemarau panjang.⁷ Kemudian pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis kabut asap yang parah akibat kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran ini terjadi karena kekeringan yang parah dan praktek pembukaan lahan dengan pembakaran yang tidak terkendali. Kabut asap dari kebakaran ini menyebar ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.⁸

Berdasarkan peristiwa tersebut pemerintah berupaya untuk menciptakan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan terkait pengelolaan hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.⁹ Serta pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait pencegahan pembakaran melalui UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) nomor 32 Tahun 2009 yang secara tegas melarang pembukaan lahan dengan membakar hutan dan membuka lahan sisa tanaman dan gulma.¹⁰

Selain itu Pemerintah Indonesia juga memiliki strategi lain melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bekerja sama dengan industri kelapa sawit dengan mengeluarkan Program Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran untuk mempromosikan kelapa sawit yang berkelanjutan dan tanpa

⁷ Scihindler Dkk., "Kebakaran Hutan Dan Lahan," *Fires and drought* (1989): 61–68.

⁸ Bambang Hero Saharjo et al., *Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Komunitas Terdampak Asap*, IPB Press, 2018.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kehutanan Tahun 1999, Nomor 41, Pasal 50, Ayat 3.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009, Nomor 32, Pasal 69, Ayat 1.

pembakaran.¹¹ Pemerintah ingin mencegah kejadian serupa di masa depan dengan mengatur larangan pembakaran hutan dan lahan sekaligus memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat memicu kebakaran.

Namun upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidak mampu berjalan secara efektif untuk menghentikan pembakaran. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi pada tahun 2015. Antara tahun 2015 – 2019, 4,4 juta hektar lahan telah terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar kawasan ini (18 persen di antaranya) telah berulang kali terbakar. Pada tahun 2019, merupakan peristiwa kebakaran terburuk yang membakar 1,6 juta hektar hutan dan lahan atau setara 27 kali luas wilayah DKI Jakarta.¹² Sehingga dari keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah tersebut belum mampu mengeluarkan upaya yang tepat untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Kehadiran *Non Governmental Organization* (NGO) atau organisasi non-pemerintah dapat berperan penting sebagai solusi bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim.¹³ NGO memiliki fleksibilitas, pengetahuan, dan keahlian yang dapat melengkapi upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.¹⁴ Field (Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy) Indonesia sebagai NGO Nasional berusaha memberikan kontribusi dalam

¹¹ Purwanto, "Pencegahan Karhutla Melalui Pembukaan Lahan Tanpa Bakar," 2019.

¹² Greenpeace Indonesia, "Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir," *Greenpeace Southeast Asia Indonesia*, 2020.

¹³ Siti Melinda Haris et al., "Roles of Non-Governmental Organisations in the National Climate Change Governance: A Systematic Literature Review," *Journal of Administrative Science* 18 (2021): 222–248.

¹⁴ Noeleen Heyzer, James V. Riker, and Antonio B. Quizon, *Government NGO Relations In Asia Prospects and Challenges for People Centred Development*, vol. 21, 1995.

mengatasi dampak dari perubahan iklim ini. Field Indonesia merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan pada 1 Juni Tahun 2001 oleh anggota Tim FAO PHT (*Food and Agriculture Organization* Pengendalian Hama Terpadu) yang telah berpengalaman sebagai tim bantuan teknis sejak tahun 1989.

Pada saat ini Field Indonesia memberikan kontribusi dengan mengeluarkan program “Udara Bersih Indonesia” atau disingkat dengan Program UBI. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan Program UBI dilaksanakan karena berbagai masalah asap, kabut, dan polusi udara akibat pembakaran lahan dan hutan. Program UBI difokuskan pada mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi pembakaran lahan pertanian dan menciptakan udara bersih di Indonesia khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera dengan mempromosikan dan memberikan pelatihan Pertanian Udara Bersih dengan praktik pertanian tanpa pembakaran. Program ini dilaksanakan agar terjadinya perubahan pola perilaku pada petani yang masih sering melakukan pembakaran pada sisa hasil pertanian. Asap dari pembakaran sisa hasil pertanian tersebut mampu menaikkan emisi gas rumah kaca sehingga berdampak pada perubahan iklim.¹⁵

Program UBI dimulai sejak Februari 2021 dengan dukungan dana dari EarthCare Foundation dan akan berlangsung hingga 31 Maret 2024. Program dilaksanakan di 8 provinsi paling rawan kebakaran, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, yang mencakup 287 desa. Dalam pelaksanaan kegiatan, Program

¹⁵ Heru Setyoko, wawancara oleh penulis, 17 Desember 2022

Udara Bersih Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lokal, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Desa di 8 Provinsi (yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat), serta Sekolah Dasar lokal di Riau dan Jambi.¹⁶

Program Udara Bersih Indonesia melengkapi upaya dan komitmen pemerintah pada COP (*Conference of Parties*)-26 dan COP-27 untuk bekerja sama dengan komunitas global untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata dunia tidak lebih dari 1,5° C. Dengan mempromosikan teknik Udara Bersih Indonesia bersama dengan Kementan, Field akan membantu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi pembakaran dan dengan demikian emisi karbon, metana dan karbon hitam yang terkait dan serta mengurangi banjir sawah yang telah terbukti menghasilkan metana dalam jumlah besar. Oleh karena itu melalui Program Udara Bersih Indonesia ini Field berusaha memberikan kontribusi dalam rangka memerangi dampak dalam perubahan iklim.¹⁷

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memerangi dampak perubahan iklim dengan meratifikasi konvensi internasional tentang perubahan iklim dan menetapkan peraturan serta program untuk melindungi Indonesia dari ancaman

¹⁶ Heru Setyoko, wawancara oleh penulis, 17 Desember 2022

¹⁷ Heru Setyoko, wawancara oleh penulis, 17 Desember 2022

perubahan iklim. Namun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia belum bisa mengatasi dampak perubahan iklim yang terus dirasakan hingga saat ini. Field Indonesia sebagai NGO nasional berusaha untuk memberikan solusi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim. Field Indonesia fokus untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan agar permasalahan perubahan iklim dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini dilakukan karena melihat upaya pemerintah yang belum efektif dalam menyikapi permasalahan perubahan iklim ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana peran yang dilakukan oleh Field Indonesia untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dari rumusan masalah maka pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana peran yang dilakukan oleh Field Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui Program Udara Bersih Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan Field Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui Program Udara Bersih Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Hubungan Internasional dan menjadi referensi untuk peneliti yang akan meneliti permasalahan terkait isu perubahan iklim serta menjadi sumber referensi kepustakaan terutama di Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan mitigasi perubahan iklim sekaligus mengetahui strategi untuk memerangi dampak dari perubahan iklim. Kemudian bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk mengambil kebijakan terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

1.6 Kajian Pustaka

Penulis menggunakan sejumlah penelitian sebelumnya sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan penelitian ini. Untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian penulis menggunakan penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan dan pedoman. Tulisan pertama merujuk pada artikel yang berjudul *The Voices of Local NGOs in Climate Change Issues: Examples from Climate Vulnerable Nations* yang ditulis oleh Ian McGregor dkk pada tahun 2018. Tulisan ini menjelaskan kontribusi NGO di beberapa negara sebagai anggota *Climate Vulnerable Forum (CVF)* yaitu,

Afghanistan, Bhutan, Kiribati, Nepal, dan Tuvalu dalam mengambil tindakan, menghasilkan pengetahuan dan pemahaman baru serta berkontribusi pada rencana dan tindakan untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan asumsi bahwa kelima negara tersebut memiliki kesamaan yaitu negara tersebut merupakan negara berkembang.

Studi ini menunjukkan bahwa NGO lokal memiliki suara dalam diskusi perubahan iklim. NGO berkontribusi meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan seputar masalah adaptasi iklim. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan kembali peran NGO lokal di negara-negara berkembang yang berisiko terhadap perubahan iklim. NGO dalam penelitian ini merupakan perantara pengetahuan, mendorong pembelajaran dan berbagi pengetahuan di komunitas lokal untuk mendorong penyebaran informasi kepada masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim.¹⁸ Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi bagi penulis karena membahas kontribusi dari NGO lokal yang ada di negara berkembang untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.

Tulisan kedua merujuk pada artikel yang berjudul *Strategies for mitigation of climate change* yang ditulis oleh Samer Fawzy dkk pada tahun 2020. Artikel ini mengulas strategi utama pengurangan perubahan iklim, yaitu *conventional mitigation, negative emissions and radiative forcing geoengineering*. *Conventional mitigation* membahas tentang pengurangan emisi CO₂ berbasis fosil. *Negative emissions,*

¹⁸ McGregor, Ian, Hilary Yerbury, and Ahmed Shahid. "The Voices of Local NGOs in Climate Change Issues: Examples from Climate Vulnerable Nations." *Cosmopolitan Civil Societies* 10, no. 3 (2018): 63–80.

bertujuan untuk menangkap dan menyerap karbon atmosfer untuk mengurangi tingkat karbondioksida. Dan *radiative forcing geoengineering* berfokus untuk mengubah anggaran energi radiasi bumi untuk menstabilkan atau mengurangi suhu global. Namun ketiga strategi ini dipandang belum efektif untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Strategi yang disebutkan hanya untuk menanggulangi efek jangka pendek saja dan belum memikirkan efek jangka panjang. Sehingga dibutuhkan strategi yang lebih kuat lagi dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.¹⁹ Tulisan ini menjadi referensi bagi penulis karena sama-sama membahas strategi untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim.

Tulisan ketiga merujuk pada artikel yang berjudul *The Role of NGOs in Climate Policies: The Case of Tunisia* yang ditulis oleh Adel Ben Youssef pada tahun 2021. Artikel ini mengkaji peran NGO dalam kebijakan iklim di Tunisia, bagaimana partisipasi NGO dalam proses negosiasi iklim, dan keefektifan mereka dalam advokasi perubahan iklim dengan metode survei penyebaran kuisisioner secara online dan offline.

Melalui metode survei yang dilakukan, ditemukan hasil sebagai berikut. Pertama, dengan terlibatnya NGO pada aksi perubahan iklim dapat memberikan efek yang positif terhadap upaya yang telah dilakukan. Kedua, peningkatan kapasitas berdampak signifikan pada ketahanan iklim tahun 2050, ekonomi dekarbonisasi 2050, dan pendidikan perubahan iklim yang berkelanjutan. Ketiga, NGO mendapatkan peluang untuk berkontribusi dalam penyusunan undang-undang terkait perubahan

¹⁹ Samer Fawzy et al., "Strategies for Mitigation of Climate Change: A Review," *Environmental Chemistry Letters* 18, no. 6 (2020): 2069–2094.

iklim. Keempat, NGO yang bekerja sama dengan pemerintah dan menerima dana dari organisasi internasional lebih mungkin terlibat dalam aksi perubahan iklim, negosiasi iklim, dan implementasi program. Kelima, NGO yang terlibat dalam pelaksanaan program kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan lain. Akhirnya, peningkatan anggaran dan jumlah sumber pendanaan tampaknya berkorelasi positif dengan partisipasi dalam perubahan kebijakan atau negosiasi perubahan iklim.²⁰ Tulisan ini layak dijadikan referensi karena sama-sama membahas peran dari NGO untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim.

Tulisan keempat merujuk pada artikel yang berjudul *Roles of Non-Governmental Organisations in the National Climate Change Governance* yang ditulis oleh Siti Melinda Haris,dkk pada tahun 2021. Artikel ini menjelaskan bahwa NGO mampu memainkan banyak peran dalam tata kelola perubahan iklim nasional. Kajian ini dipandu oleh pertanyaan penelitian "Apa saja peran NGO dalam tata kelola perubahan iklim nasional?". Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, tinjauan ini menggunakan metodologi tinjauan sistematis untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan peran NGO dalam tata kelola perubahan iklim dengan menggunakan empat langkah, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut.

Pertama, sebagai advokat dan aktivis dalam hal ini NGO berperan untuk mempromosikan isu-isu mitigasi dan adaptasi untuk meningkatkan kesadaran publik dan melakukan kampanye yang gencar untuk perubahan kebijakan yang berpihak pada

²⁰ Youssef, *The Role of NGOs in Climate Policies: The Case of Tunisia, 2021*.

rakyat. Kedua, peran sebagai perwakilan, dalam hal ini NGO bertugas sebagai perwakilan yang mampu mewakili suara masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sebagai jembatan penghubung bagi masyarakat untuk berkomunikasi kepada pemerintah, instansi, dan pemangku kebijakan lainnya.²¹

Ketiga, peran sebagai penyedia informasi, NGO bertindak dalam menyediakan dan menyebarkan informasi terkait iklim, mengumpulkan informasi dan memberikan informasi kepada rakyat dan pemerintah agar terciptanya kebijakan yang adil dan terjalannya komunikasi yang harmonis di antara keduanya. Keempat, peran sebagai pelatih, NGO berperan untuk memberikan pelatihan teknis kepada masyarakat terkait untuk adaptasi iklim, serta memberikan pelatihan untuk pengembangan kapasitas.

Kelima, peran sebagai peneliti, NGO berperan untuk mempelajari dan menyelidiki subjek atau materi secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan baru terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Keenam, peran sebagai pelaksana, melaksanakan strategi mitigasi dan adaptasi di bawah kebijakan perubahan iklim. Ketujuh, peran sebagai inovator, berinovasi untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi iklim kepada publik, menciptakan stasiun pemantauan cuaca, memperkenalkan strategi advokasi baru. Terakhir, sebagai pengawas, NGO berperan dalam memantau perubahan iklim dan kebijakan hutan, memeriksa tindakan pemerintah, dan memantau proses kebijakan perubahan iklim.²² Artikel ini layak

²¹ Haris et al., *Roles of Non-Governmental Organisations in the National Climate Change Governance: A Systematic Literature Review*, vol. 18, 2021.

²² Haris et al., *Roles of Non-Governmental Organisations in the National Climate Change Governance: A Systematic Literature Review*, vol. 18, 2021.

dijadikan referensi karena sama sama membahas peran NGO dalam negoisasi perubahan iklim.

Tulisan kelima merujuk pada artikel yang berjudul *Framing different energy futures? Comparing Fridays for Future and Extinction Rebellion in Germany* yang ditulis oleh Aron Buzogany dan Patrick Scherhauser pada tahun 2022. Tulisan ini membahas tentang bagaimana dua aktor utama gerakan keadilan iklim yang aktif di Jerman Fridays for Future (FFF) dan Extinction Rebellion (ER). Artikel ini menganalisis secara komparatif gerakan pada tatanan sosial, politik, ekonomi, dan epistemik. Fokus empiris pada tulisan ini adalah pada strategi framing yang digunakan oleh FFF dan ER di Jerman dengan menggunakan konsep framing (*diagnostic, prognostic, dan motivasional*) menurut Snow dan Benford.

Kedua gerakan tersebut dipilih karena pentingnya mereka dalam wacana perubahan iklim dan menganggap perubahan iklim sebagai ancaman utama bagi masa depan dan pembangunan demokrasi. Kedua gerakan tersebut menunjuk pada perubahan melalui berbagai bentuk kegiatan protes dan dengan menggunakan berbagai aksi dan komunikasi, seperti demonstrasi, manifestasi, pengumpulan tanda tangan, siaran pers, selebaran, kampanye publik dan media sosial, dan tindakan pembangkangan sipil.

FFF lebih banyak mengandalkan imajinasi apokaliptik tentang perubahan iklim. Di sini, tanggung jawab untuk keberhasilan transisi keberlanjutan jelas terletak pada para pengambil keputusan politik dan transisi hanya mungkin terjadi jika politik akan bertindak cepat. Sebaliknya, ER terutama menggunakan bingkai pasca-

apokaliptik dan membangkitkan bencana iklim dan kepunahan massal yang sudah berlangsung. Oleh karena itu, perubahan politik dan masyarakat yang radikal dipandang perlu untuk mencegah malapetaka yang akan datang.

Dalam hal kerangka utama tentang tatanan politik, FFF tampaknya mendukung sistem demokrasi liberal saat ini di mana perwakilan yang dipilih memiliki otoritas, legitimasi, dan kapasitas untuk menangani perubahan iklim, tetapi protes massa diperlukan untuk mendorong mereka maju dan memikul tanggung jawab. XR, pada gilirannya, jelas mendukung elemen-elemen partisipatif dan deliberatif dari demokrasi. Oleh karena itu, di mata XR, sistem politik perlu dilengkapi dengan elemen-elemen demokrasi deliberatif dan metode-metode di mana warga negara dapat membuat keputusan yang mengikat mereka sendiri.²³ Tulisan ini layak menjadi referensi karena memiliki kesamaan isu dengan topik penelitian yang akan diteliti.

Tulisan keenam merujuk pada artikel jurnal yang berjudul *Social Media and Environmental Activism: Framing Climate Change on Facebook by Global NGOs* yang ditulis oleh Hong Tien Vu dkk pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisis konten media sosial oleh NGO pada isu iklim untuk memberikan wawasan tentang bagaimana organisasi-organisasi ini membangun pesan strategis tentang perubahan iklim di *facebook*. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pembingkai dengan menganalisis bingkai gerakan sosial oleh Benford dan Snow yang berfokus pada proses menyoroti bagian dari elemen-elemen pembingkai. Dengan menggunakan

²³ Aron Buzogány and Patrick Scherhauser, "Framing Different Energy Futures? Comparing Fridays for Future and Extinction Rebellion in Germany," *Futures* 137, no. July 2021 (2022).

perubahan iklim sebagai kasus uji coba, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mengoperasionalkan bingkai diagnostik, prognostik, dan motivasional dalam mempelajari komunikasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan melihat tiga aspek penting dalam isu ini, yaitu dampak, tindakan, dan keberhasilan.²⁴

Pada kajian pustaka di atas, ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan untuk mengidentifikasi inovasi dalam penelitian ini. Persamaan dari kajian pustaka di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas isu perubahan iklim. Sementara perbedaannya yaitu pada tulisan pertama terdapat perbedaan negara yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pada tulisan kedua terdapat perbedaan strategi yang digunakan dalam pencegahan perubahan iklim.

Tulisan ketiga peran dari NGO di Tunisia yang mendapatkan dukungan dari pemerintah sehingga mampu membuka ruang gerak bagi NGO untuk melakukan aksi dengan optimal terkait mitigasi pada perubahan iklim, disini juga terdapat perbedaan negara yang akan diteliti oleh penulis. Tulisan keempat peran NGO dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai advokat dan aktivis, perwakilan, penyedia informasi, pelatih, peneliti, pelaksana, inovator, dan pengawas. Tulisan kelima membahas perbandingan dua gerakan sosial yang ada di Jerman terkait aksi untuk perubahan iklim. Tulisan keenam membahas strategi NGO dalam melakukan aksi perubahan iklim melalui kampanye online di *facebook*. *Literature review* yang telah dijelaskan di atas

²⁴ Hong Tien Vu et al., "Social Media and Environmental Activism: Framing Climate Change on Facebook by Global NGOs," *Science Communication* 43, no. 1 (2021): 91–115.

mampu memberikan kontribusi yang besar pada penelitian yang akan penulis lakukan. Fokus penelitian yang terdapat pada *literature review* dengan fokus penelitian penulis memiliki perbedaan, di mana penulis fokus membahas upaya NGO lokal di Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang telah penulis jelaskan pada kajian pustaka.

1.7 Kerangka Konseptual

Penggunaan teori atau konsep sangat diperlukan untuk membantu penelitian dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada di dalam sebuah penelitian. Agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam permasalahan ini, peneliti menggunakan konsep *Role of NGO theory* oleh Lucas J Giese. Konsep ini penting untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini.

1.7.1 Role of NGO Theory

United Nations mendefinisikan NGO sebagai organisasi masyarakat sipil yang bersifat sukarela, terorganisir ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Anggota dari NGO merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. NGO melakukan berbagai layanan dan tugas kemanusiaan, mengomunikasikan keprihatinan masyarakat kepada pemerintah, memantau kebijakan, dan mendorong keterlibatan politik di tingkat masyarakat. NGO menawarkan analisis dan pengetahuan, serta memberikan dukungan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

perjanjian internasional. Biasanya NGO melakukan tugas dan fungsinya dengan memusatkannya pada isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesehatan.²⁵

Dengan kata lain NGO adalah kelompok individu yang diorganisir untuk berbagai alasan dan tujuan dalam menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat. NGO adalah organisasi yang dikelola secara profesional yang bertujuan memberikan kontribusi untuk mengurangi penderitaan manusia dan untuk pembangunan sebuah negara.²⁶ NGO melakukan hal ini dengan berbagai cara, misalnya dengan mendanai program-program, terlibat dalam penyediaan layanan dan pengembangan kapasitas, serta memberikan kontribusi terhadap kepentingan masyarakat.²⁷

Dalam menjalankan aktivitasnya NGO memiliki beberapa peran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁸ Beberapa peran tersebut yaitu :

1. *Issue Framing dan Agenda Setting*

Issue framing dan agenda setting merupakan langkah awal bagi sebuah NGO untuk menjalankan strateginya. Langkah ini merupakan langkah utama karena memiliki pengaruh pada setiap interaksi strategi yang akan dilakukan selanjutnya. McAdam, McCarthy, dan Zald menjelaskan *issue framing* sebagai

²⁵ Hildy Teegen, Jonathan P. Doh, and Sushil Vachani, "The Importance of Nongovernmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda," *Journal of International Business Studies* 35, no. 6 (2004): 463–483.

²⁶ Kurnia Novianti, "Peran NGOs (Non-Governmental Organizations) Lingkungan Dalam Mitigasi Banjir Di Praha, Republik Ceko," *Kajian Wilayah* 4, no. 2 (2013): 165–184.

²⁷ Lucio Baccaro, *Civil Society, NGOs, and Decent Work Policies: Sorting out the Issues, International Institute for Labour Studies Discussion Paper Series*, 2001.

²⁸ Lucas J Giese, "The Role of NGOs in International Climate Governance : A Case Study of Indian NGOs A Case Study of Indian NGOs," no. 2017 (2017): 2016–2019.

peran strategis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan persepsi terkait permasalahan yang terjadi kemudian memberikan justifikasi serta dorongan terhadap tindakan kolektif yang akan dilakukan. *Issue framing* merupakan sebuah proses pembedaan sebuah masalah dengan tujuan untuk mengenali fenomena apa yang sedang terjadi dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan.

Agenda setting dan issue framing merupakan dua aktivitas yang saling berhubungan. Diperlukan upaya yang konkrit atas sebuah fenomena yang telah diidentifikasi. Menurut Betsill dan Corell *agenda setting* merupakan bagian penting dalam merumuskan kebijakan secara berkelanjutan. *Agenda setting* adalah proses mengenali masalah, mendorong pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan, dan menambahkannya sebagai agenda tindakan nyata.

Agenda setting melibatkan institusi politik dalam proses pengambilan kebijakan, sedangkan *issue framing* berfokus pada identifikasi dan pemahaman fenomena sebagai isu yang membutuhkan tindakan publik. Meskipun *issue framing* dan *agenda setting* terjadi secara bersamaan dan dengan cara yang berbeda, tetapi keduanya memiliki pengaruh besar untuk mempertimbangkan dampak NGO. Dapat dikatakan bahwa NGO memiliki kemampuan dalam mempengaruhi kebijakan jika mereka mampu menarik perhatian terhadap suatu isu dan membina dengan mendorong sebuah kebijakan.

2. *Information Provision* (Penyedia Informasi)

Dalam proses negosiasi lingkungan internasional NGO merupakan penyedia informasi utama dan memberikan bantuan teknis. Keck and Sikkink menjelaskan NGO berpartisipasi dalam “information politics,” yang berkaitan dengan produksi dan distribusi informasi yang sesuai. NGO tidak hanya berfokus sebagai pemberi informasi ilmiah dan teknis, tetapi juga memerhatikan dialog khusus yang sesuai untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Dialog khusus yang menjadi perhatian tersebut dipilih secara hati-hati oleh NGO dan jaringannya, menyajikan himbuan oleh individu atau kelompok yang terpengaruh dengan hasil kebijakan negosiasi, seperti kelompok lokal atau masyarakat adat yang dipengaruhi oleh kesepakatan global.

3. *Lobbying and Campaigning* (Lobi dan Kampanye)

Aktivitas NGO selanjutnya dalam negosiasi lingkungan internasional adalah lobi dan kampanye yang umum terjadi selama proses negosiasi. NGO menggunakan cara formal untuk mencoba memengaruhi negosiasi, seperti memanfaatkan akses yang telah diberikan untuk berpartisipasi dalam negosiasi dengan mengirimkan pernyataan tertulis atau lisan pada forum formal serta dengan cara informal seperti melakukan diskusi dengan pembuat kebijakan. Lobi dan kampanye dilakukan untuk memengaruhi keputusan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Sehingga melalui aktivitas ini dapat menjelaskan pengaruh NGO yang juga berpartisipasi dalam peran yang lebih

luas untuk memberikan pengaruh menggunakan media dan demonstrasi untuk memberikan informasi kepada publik dan meningkatkan tekanan kepada pemerintah terhadap kepentingan publik.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Secara epistemologis, metodologi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa mengetahui bagaimana asal usul sebuah fenomena dalam hubungan internasional dapat terjadi. Metode penelitian merupakan langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dari penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang melakukan pengkajian dan pemahaman terhadap sekelompok individu yang berasal dari permasalahan sosial.²⁹ Penelitian kualitatif bersifat induktif, dengan menarik abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori berdasarkan data-data dan informasi yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan cara melakukan pengkajian secara mendalam terhadap fenomena yang diangkat dalam penelitian dan dijelaskan secara rinci.

²⁹ W John Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative Adn Mixed Methods Approaches*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, (2018), 162.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan dalam penelitian sebagai acuan agar tetap fokus dalam meneliti sehingga cakupan dari penelitian sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Batasan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2019-2023. Tahun 2019 merupakan tahun pertama bagi Field Indonesia dalam menginisiasi awal Program Udara Bersih Indonesia.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dianalisis, dijelaskan, dan diramalkan. Unit analisis juga dapat disebut sebagai variabel dependen. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Peran Field Indonesia melalui Program Udara Bersih Indonesia. Unit eksplanasi adalah unit yang memberikan dampak terhadap unit analisis atau disebut juga dengan variabel independen. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Terkait tingkat analisis yaitu global karena isu perubahan iklim dampaknya tidak mengenal batas negara dan melibatkan semua aspek dari tingkat lokal hingga internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai keabsahan dari data yang didapatkan, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi dan studi literatur. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan pihak Field Indonesia secara *offline* dan *online* melalui aplikasi *whatsapp* dan *zoom* untuk mengetahui informasi yang lebih spesifik terkait

kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti mengakses situs resmi Field Indonesia (Field-indonesia.org), situs resmi Program UBI (<https://ubifield.my.id/>) pencarian berita, jurnal ilmiah, dokumen, buku, dan tulisan ilmiah lainnya untuk kemudian dianalisis. Untuk bagian dokumentasi akan diminta langsung kepada narasumber dari Field Indonesia dan dokumentasi yang berasal dari situs resmi dan akun media sosial Field Indonesia seperti facebook dan instgram. Dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan, selanjutnya dilakukan perbandingan data kemudian penarikan kesimpulan dan kesamaan data. Jika kesimpulan dari masing-masing data sama, maka keabsahan penelitian bisa didapatkan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan tahapan analisis data menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu :³⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses seleksi, memusatkan, menyederhanakan, mengabstrakkan, serta melakukan transformasi terhadap data yang ada di berbagai tulisan yang dijadikan referensi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mereduksi data berdasarkan fokus penelitian melalui beberapa kata kunci yaitu Mitigasi Perubahan Iklim, Pembakaran Lahan, NGO, Field Indonesia. Penggunaan kata kunci dapat memudahkan

³⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, "Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook", Second Edition, (United States of America, SAGE Publications, 1994), 11.

peneliti untuk mereduksi data agar memperoleh data yang relevan dengan area penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap selanjutnya yang akan peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah menyajikan data. Secara umum, penyajian data adalah sebuah proses pengorganisasian dan meringkas kumpulan informasi yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya yang nantinya akan ditarik kesimpulan dari ringkasan tersebut. Bentuk penyajian data yang paling umum biasanya disajikan melalui bentuk uraian. Dalam penelitian ini, kumpulan data yang diperoleh dari tahapan reduksi data akan disajikan melalui bentuk uraian terkait Peran Field Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui Program Udara Bersih Indonesia.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Peneliti akan mencatat berbagai penjelasan dari data yang diperoleh kemudian akan menarik kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dielaborasi.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB II PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DAN MITIGASINYA DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan mengenai permasalahan perubahan iklim yang terjadi secara global, kemudian penjelasan permasalahan perubahan iklim di Indonesia, kondisi geografis Indonesia, penyebab permasalahan perubahan iklim, komitmen Indonesia dalam konvensi internasional terkait perubahan iklim, dan upaya apa saja yang telah dilakukan dalam memerangi dampak dari perubahan iklim tersebut.

BAB III FIELD INDONESIA DAN PROGRAM UDARA BERSIH INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang Field Indonesia dan Program Udara Bersih Indonesia secara detail. Memaparkan sejarah, profil, tujuan dan prinsip – prinsip, struktur organisasi, serta program-program yang dijalankan

oleh Field Indonesia, latar belakang serta tujuan Program Udara Bersih Indonesia.

BAB IV PERAN FIELD INDONESIA DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI PROGRAM UDARA BERSIH INDONESIA.

Bab ini menjelaskan analisis peran yang dilakukan oleh Field Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim melalui Program Udara Bersih Indonesia dengan konsep yang ditelah dijelaskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang menjelaskan kesimpulan dan saran terkait penelitian permasalahan ini.

